

2023



# LAPORAN KINERJA

**DINAS TENAGA KERJA**

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKj Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2023 masih tetap memprioritaskan kebijakan belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat miskin/kurang mampu serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap hidup harus terus dilakukan.

Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2024  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ELIUS GANI, SP  
NIP. 19710115 199503 1 001

## Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Pencari Kerja yang dilatih dan/atau ditempatkan”.

- Diukur dengan indikator kinerja “Presentase Pencari Kerja yang dilatih dan / atau ditempatkan” dengan Formulasi Perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari kerja yang terdaftar}} \times 100 \%$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja;
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 5% sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 51,76%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 9,65%;
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 17,9% terjadi peningkatan sebesar 7,35%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Perusahaan yang memahami dan/atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan”.

- Diukur dengan indikator kinerja “Persentase peningkatan perusahaan yang memahami dan/atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan” dengan Formulasi Perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang mendapat pembinaan dan/atau pengawasan}}{\text{Jumlah Perusahaan sesuai WLKP Tahun sebelumnya}} \times 100 \%$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 26%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 terealisasi 31,72%. Dengan demikian capaian ini melebihi pencapaian target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%)  $(26 : 31,72 \times 100)$  mencapai 83,8%;
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 13% terjadi kenaikan sebesar 70,8%.

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Satuan Pemukiman Yang Telah Mendapat Binaan”.

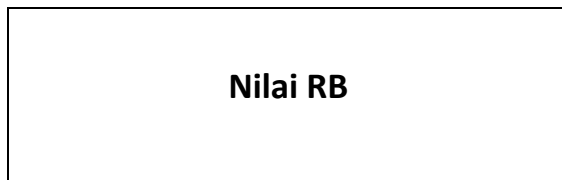
- Diukur dengan indikator kinerja “Persentase Satuan Pemukiman Yang Telah Mendapat Binaan” dengan Formulasi Perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Satuan Pemukiman Yang Dibina}}{\Sigma \text{ Seluruh Satuan Pemukiman}} \times 100 \%$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 14%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 terealisasi 100% (1 Kawasan). Dengan demikian capaian ini mencapai target sesuai harapan. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%;
- Perbandingan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 100%, jadi capaiannya tetap stabil.

4. Capaian sasaran strategis 4 “Meningkatnya Nilai RB”.

- Diukur dengan indikator kinerja “Nilai RB” dengan Formulasi Perhitungan sebagai berikut :



- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 46 Nilai sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi ..... Dengan demikian capaian ini belum melampaui target.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 30,34 terjadi peningkatan sebesar .....

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah;
2. Menurunkan angka pengangguran yang masih tinggi;
3. Perlunya pembangunan SDM yang berkualitas, dan perkembangan ekonomi digital dan tren teknologi yang mengubah lanskap aksi, misi dan visi ke depan, sehingga mempengaruhi peta kebutuhan tenaga kerja dan perubahan pola hubungan kerja yang semakin dinamis.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH .....	1
Kata Pengantar .....	2
Ikhtisar Eksekutif .....	3
Daftar Isi .....	6
Daftar Tabel .....	8
Daftar Gambar .....	9
BAB I .....	10
Pendahuluan .....	10
1.1 <i>Cascading</i> Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi .....	10
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan .....	12
1.3 Isu-Isu Strategis .....	13
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran .....	13
BAB 2 .....	31
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	31
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....	31
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	323
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....	334
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	38
BAB 3 .....	42
Akuntabilitas Kinerja .....	42
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	42
Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	42
Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	42
3.1.1. Sasaran : Meningkatnya Tenaga Kerja yang ditempatkan .....	43
Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	44
Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	46
Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	50
Faktor Pendukung keberhasilan .....	565
Faktor Penghambat keberhasilan .....	566
3.2 Efisiensi Anggaran .....	56
Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023 .....	566
3.3 Inovasi .....	577
3.4 Penghargaan .....	588

	Sepanjang Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :.....	588
	- Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2022 dari Kemenentrian Ketenagakerjaan RI untuk kategori urusan ketenagakerjaan kecil terbaik kedua dan akselerasi IPK terbaik. ....	588
BAB 4	.....	59
	Penutup.....	59

## Daftar Tabel

---

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana .....	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023 .....	15
Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 ..	30
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	31
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	32
Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	34
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023.....	37
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun .....	38
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	40
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	40
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1 .....	43
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja .....	44
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023 .....	49

## Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Cascading Kinerja Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	12
Gambar I.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	13

# BAB I

## Pendahuluan

### **Bab I berisi :**

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

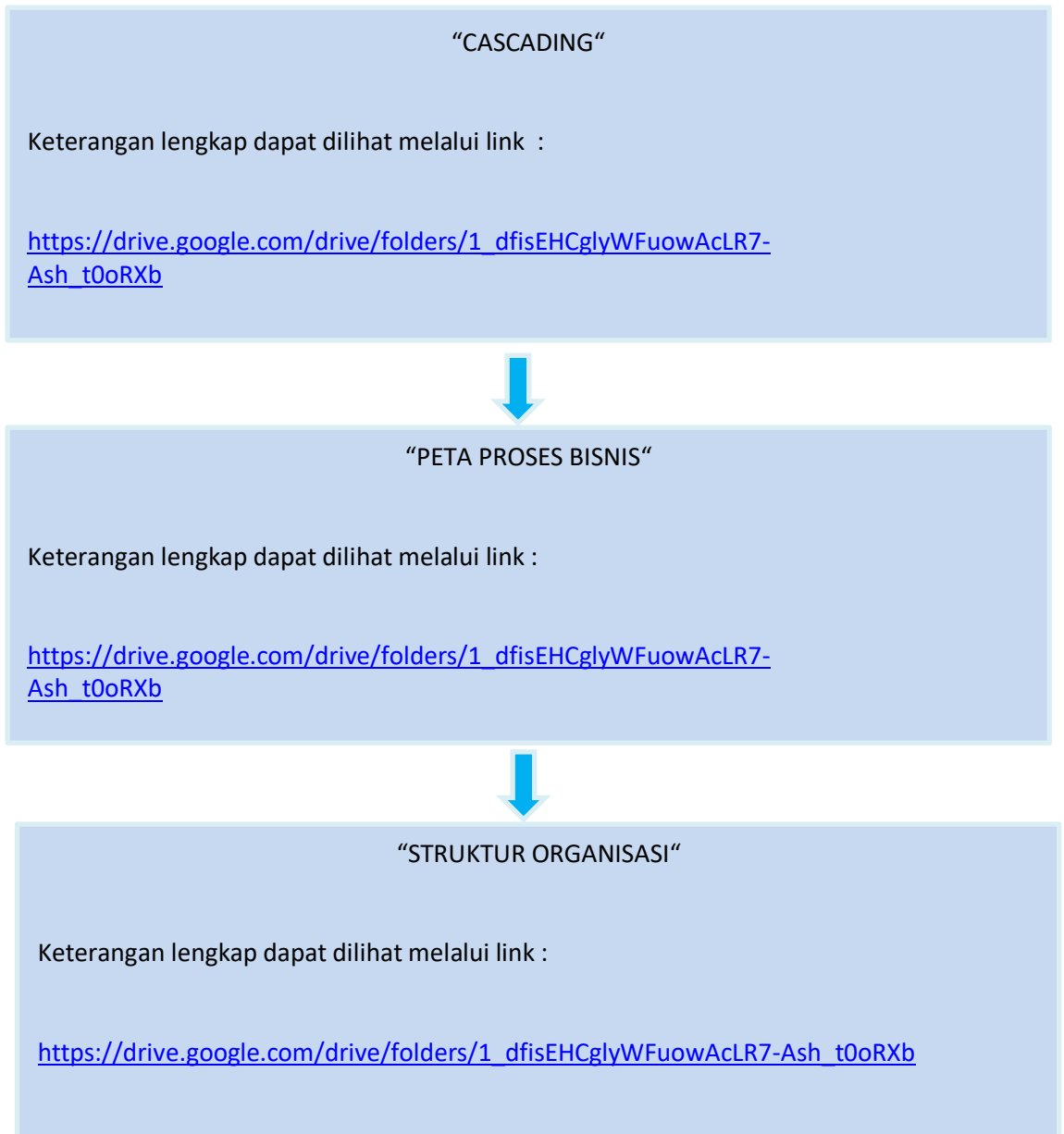
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

### **1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RKPD tahun 2023. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**  
(halaman ini dapat di buat landscape)



## 1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 1.2.**  
**Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja**  
**Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan. Adapun tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

### **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 6 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja**

**Tugas :** Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

### **Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:**

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan Kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas ketenagakerjaan dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



### **“PETA JABATAN”**

Keterangan lengkap dapat dilihat melalui link :

[https://drive.google.com/drive/folders/1\\_dfisEHCglyWFuowAcLR7-Ash\\_t0oRXb](https://drive.google.com/drive/folders/1_dfisEHCglyWFuowAcLR7-Ash_t0oRXb)

### **1.3 Isu-Isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan”, antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya kompetensi dan kualitas pencari kerja untuk memasuki pasar kerja;
2. Kurang harmonisnya Hubungan Industrial di tempat kerja yang ditandai dengan tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan Hubungan Industrial;
3. Rendahnya kompetensi warga transmigrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran padatahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1/ D IV	D3	SLTA/SLTP		S2	S1	D3	SLTA/SLTP		
<b>A</b>	<b>JABATAN STRUKUTRAL</b>						<b>16</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
2	Sekretaris	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
3	Kepala Sub Bagian Umum	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
4	Sub Koordinator Perencanaan / Perencana Ahli Muda	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
5	Kepala Bidang Pengawasan, Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
6	Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
7	Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
8	Sub Koordinator Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Mediator Hubungan industrial Ahli Muda	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
9	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
10	Sub Koordinator Pelatihan Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas / Instruktur Ahli Muda	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
11	Sub Koordinator Transmigrasi / Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
12	Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Kerja/ Pengantar Kerja Ahli Muda	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
13	Kepala UPT Balai Latihan Kerja	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1/ D IV	D3	SLTA/SLTP		S2	S1	D3	SLTA/SLTP		
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
15	Kepala Seksi Pelatihan, Sertifikasi, dan Pemagangan	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
16	Kasi. Pengembangan dan Pemasaran	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
<b>B</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>						<b>59</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>25</b>
1	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya	4	-	4	-	-	3	-	3	-	-	2	1
2	Pengawas Ketenagakerjaan Muda	22	-	22	-	-	23	1	22	-	-	17	6
3	Mediator Hubungan Industrial Muda	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2
4	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	4	-	4	-	-	2	1	1	-	-	2	-
5	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
6	Pengantar Kerja Muda	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Instruktur Ahli Muda	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
9	Arsiparis Terampil	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
10	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama	4	-	4	-	-	1	-	1	-	-	1	-
12	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Ahli Pertama	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	1	1
13	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pengantar Kerja Ahli Pertama	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Instruktur Ahli Madya	6	-	6	-	-	5	-	5	-	-	4	1
17	Instruktur Ahli Muda	8	-	8	-	-	8	-	8	-	-	6	2
18	Instruktur Ahli Pertama	5	-	5	-	-	1	-	1	-	-	-	1
19	Instruktur Penyelia	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1/ D IV	D3	SLTA/SLTP		S2	S1	D3	SLTA/SLTP		
20	Instruktur Pelaksana Lanjutan (Mahir)	4	-	4	-	-	4	-	-	4	-	3	1
21	Instruktur Pelaksana (Terampil)	4	-	4	-	-	1	-	-	1	1	1	-
<b>C</b>	<b>JABATAN PELAKSANA</b>						<b>20</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
1	Penata Laporan Keuangan	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
2	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
3	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Bendahara	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1
5	Pengadministrasian Umum	3	-	-	-	3	2	-	-	-	2	2	-
6	Pengadministrasi Keuangan	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1
7	Pengelola Kepegawaian	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	1	1
9	Pengelola Program dan Kegiatan	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1
11	Analisis Bahan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
12	Pengelola Bahan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13	Analisis Bahan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
14	Analisis Bahan Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1
15	Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16	Analisis Bahan Peyelenggaraan Program Pemagangan	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1



Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 106 orang (67,95%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang (1,92%), D3 sebanyak 12 orang (7,69%), SLTA sebanyak 35 orang (22,44%), SLTP sebanyak 0 orang (0,00%), dan SD sebanyak 0 orang (0,00%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih sedikit dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

**Tabel I.2 Sarana-Prasarana**

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset* (dalam Rupiah)
	<b>ASET TETAP</b>		<b>69.898.750.313</b>
<b>1</b>	<b>TANAH</b>		<b>28.288.526</b>
	<b>TANAH</b>		<b>28.288.526</b>
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	luas 23000 m <sup>3</sup>	240.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	luas 4106 m <sup>3</sup>	28.048.526
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>2.197</b>	<b>22.928.969.205</b>
	<b>ALAT BESAR</b>		<b>21.000.000</b>
1	Pompa Air	5	21.000.000
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	<b>26</b>	<b>2.955.872.440</b>
1	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	5	1.354.390.800
2	Sepeda Motor	11	175.915.000
3	Mobil Ambulance	1	323.100.000
4	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1	196.350.000
5	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	3	624.478.140
6	Kapal Motor	3	211.645.500
7	alat angkutan apung bermotor untuk penumpang lainnya (dst)	2	69.993.000
	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	<b>454</b>	<b>7.999.486.458</b>
1	Mesin Bubut	4	1.386.000.000

No.	Klasifikasi	Jumlah	Nilai Aset*
2	Mesin Press Hidrolik & Punch	1	11.000.000
3	Mesin Gerinda	2	8.826.970
4	Mesin Bor Cylinder	1	27.500.000
5	Mesin Kompresor	3	35.766.290
6	Mesin Pemotong Plat	2	456.187.583
7	Mesin Gerinda Tangan	2	2.420.000
8	Mesin Bor Tangan	14	25.498.020
9	Mesin Ampelas Tangan	4	5.095.640
10	perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) lainnya (dst)	1	5.280.000
11	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	125	1.372.039.526
12	Lubricating Equipment	3	20.460.000
13	Mesin Sporing	1	18.920.000
14	perkakas bengkel service lainnya (dst)	21	360.856.200
15	perkakas pengangkat bermesin lainnya (dst)	8	412.390.000
16	Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)	4	31.964.240
17	Mesin Bor Kayu	2	2.750.000
18	Mesin Penghalus	2	2.547.820
19	perkakas bengkel kayu lainnya (dst)	8	50.957.720
20	Perkakas Bongkar/Pasang Ban	1	23.980.000
21	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	8	182.398.250
22	Peralatan Las Listrik	19	1.125.057.901
23	peralatan las lainnya (dst)	10	76.665.732
24	Perkakas Pemotong Plat	6	6.622.440
25	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	9	75.923.800
26	Lubricating Set (Perkakas Bengkel Service)	2	7.326.000
27	perkakas bengkel service lainnya (dst)	25	342.223.130
28	Tool Kit Set	32	254.624.908
29	Tool Cabinet Set	3	9.900.000
30	Puller Set	3	8.250.000
31	Engine Stand	10	830.370.230
32	perkakas standard (standard tools) lainnya (dst)	9	92.385.700

No.	Klasifikasi	Jumlah	Nilai Aset*
33	Kunci Khusus Untuk Engine	4	9.020.000
34	Kunci Khusus Moment	2	3.575.000
35	perkakas khusus (special tools) lainnya (dst)	2	7.700.000
36	Gergaji	4	8.908.680
37	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	5	90.002.550
38	peralatan tukang besi lainnya (dst)	2	5.040.664
39	peralatan tukang kayu lainnya (dst)	12	35.315.280
40	Power Meter And Accessories	2	12.320.000
41	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	4	14.740.000
42	Noise	1	60.459.300
43	Global Positioning System	1	4.279.000
44	Color Bar Generator	1	9.790.000
45	oscilloscope lainnya (dst)	5	65.340.000
46	Frequency Counter (Universal Tester)	4	27.720.000
47	Scanner (Universal Tester)	4	8.987.884
48	Termometer Standar	6	6.600.000
49	Standard Guage Blocks	2	4.840.000
50	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	48	352.660.000
	<b>ALAT PERTANIAN</b>	<b>6</b>	<b>19.269.144</b>
1	Lemari Penyimpan	2	12.000.000
2	Ragum/Catok	4	7.269.144
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>1.190</b>	<b>4.411.389.159</b>
1	Mesin Absen (Time Recorder)	5	46.500.000
2	Lemari Besi/Metal	61	249.232.000
3	Lemari Kayu	46	148.804.800
4	Rak Besi	18	51.087.500
5	Rak Kayu	1	3.400.000
6	Filing Cabinet Besi	50	112.558.448
7	Brandkas	2	8.590.000
8	Lemari Makan	3	7.500.000
9	CCTV - Camera Control Television System	12	59.100.000

No.	Klasifikasi	Jumlah	Nilai Aset*
10	Alat Penghancur Kertas	2	5.735.000
11	Mesin Absensi	1	20.900.000
12	Overhead Projector	1	1.214.400
13	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1.153.680
14	Papan Nama Instansi	1	15.000.000
15	Alat Kantor Lainnya	15	29.053.500
16	Meja Kerja Besi/Metal	4	76.560.000
17	Meja Kerja Kayu	67	99.340.600
18	Kursi Besi/Metal	1	2.430.000
19	Meja Rapat	7	52.842.500
20	Tempat Tidur Besi	3	15.000.000
21	Tempat Tidur Kayu	134	593.892.184
22	Meja Resepsionis	3	23.936.000
23	Meja Tambahan	2	14.300.000
24	Meja Panjang	3	3.900.000
25	Meja Bundar	2	4.730.000
26	Meja 1/2 Biro	97	181.504.500
27	Meja Makan Besi	20	37.900.000
28	Kursi Rapat	18	22.500.000
29	Kursi Tamu	7	19.406.250
30	Kursi Putar	8	9.600.000
31	Bangku Tunggu	2	12.000.000
32	Partisi	53	516.955.390
33	Sofa	45	102.826.236
34	Meubeleur lainnya	1	1.171.500
35	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	4	17.077.000
36	Mesin Pemotong Rumput	3	7.500.000
37	Lemari Es	52	92.252.500
38	A.C. Split	92	492.066.800
39	Alat Dapur lainnya	1	1.015.300
40	Televisi	64	201.728.090

No.	Klasifikasi	Jumlah	Nilai Aset*
41	Loudspeaker	5	23.993.750
42	Sound System	4	23.865.320
43	Microphone	13	27.020.000
44	Stabilisator	11	120.968.000
45	Camera Video	3	10.176.750
46	Camera film	6	67.695.000
47	Tustel	1	5.500.000
48	Mesin Jahit	20	147.265.259
49	Tiang Bendera	1	10.000.000
50	Tangga Aluminium	2	5.196.840
51	Dispenser	8	26.956.000
52	Handy Cam	5	47.508.250
53	Mesin obras	8	67.056.880
54	Gordyin/Kray	59	177.350.000
55	Tangga	1	4.635.000
56	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	2.811.600
57	Alat Pemadam/Portable	12	42.090.000
58	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	9	15.907.500
59	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	7.615.300
60	Meja Tamu Biasa	42	47.163.690
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2.196.700
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	7.148.800
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	14.850.000
64	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	5.650.000
65	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	5.600.000
66	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	47	132.904.342
	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	<b>30</b>	<b>229.658.461</b>
1	Audio Amplifier	2	40.022.031
2	Microphone/Wireless MIC	1	2.295.000
3	Power Amplifier	1	9.500.000

No.	Klasifikasi	Jumlah	Nilai Aset*
4	Digital Audio Storage System	2	39.600.000
5	Camera Electronic	2	19.750.000
6	Rak Peralatan	1	4.935.260
7	Camera Film	2	5.000.000
8	Layar Film/Projector	7	72.944.720
9	Mesin Proof	1	10.835.000
10	Telephone (PABX)	1	1.850.000
11	Handy Talky (HT)	2	4.000.000
12	Facsimile	7	17.332.700
13	peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	1	1.593.750
	<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>		<b>465.281.414</b>
1	Co2 Analyzer (Alat Kedokteran Umum)	2	85.950.150
2	Utility Trolley	1	2.090.000
3	alat kedokteran tht lainnya (dst)	2	132.260.700
4	Oxygen Therapy	2	3.937.294
5	alat kedokteran bagian penyakit dalam lainnya (dst)	1	78.200.100
6	O 2 Gas Analyzer	1	34.459.370
7	alat kesehatan matra laut lainnya (dst)	1	115.563.800
8	Alat Kesehatan Umum lainnya	1	12.820.000
	<b>ALAT LABORATORIUM</b>		<b>3.700.360.948</b>
1	alat laboratorium kimia air teknik penyehatan lainnya (dst)	2	97.500.000
2	Drill Machine	2	75.900.000
3	Cylinder	2	7.107.208
4	Dial Gauge LC.13	8	10.745.208
5	Dial & Test Indikator	4	5.280.000
6	Cutting & Welding Kit	8	18.118.520
7	Torque Wrench With Socket Head	4	4.429.568
8	Engineers Combination Square Set	4	21.742.224
9	Oven (Alat Laboratorium Umum)	14	455.541.900
10	Compressor Unit	4	12.034.000

No.	Klasifikasi	Jumlah	Nilai Aset*
11	Penagas	3	157.459.830
12	Alat Polishing	1	7.500.000
13	alat laboratorium patologi lainnya (dst)	2	24.420.000
14	Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Film)	2	8.140.000
15	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	4	31.780.854
16	Audio Generator	4	14.740.000
17	Universal Milling Machine (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola)	1	400.400.000
18	Surface Grinding Machine	1	212.300.000
19	Mesin Overdeck	4	96.795.160
20	Mesin Strika Uap	5	5.617.920
21	Mesin Bordir Highspeed	8	102.520.000
22	Air Compressor (Alat Laboratorium Pertanian)	1	1.596.650
23	Generator	2	54.687.930
24	Micrometer	13	15.747.560
25	Vernier Calliper (Alat Laboratorium Pertanian)	8	17.600.000
26	Lux Meter (Alat Laboratorium Lingkungan Perairan)	2	60.217.300
27	Noise Tester / DB Tester	1	46.457.400
28	alat laboratorium lain lainnya (dst)	5	404.552.500
29	Timing Unit	2	3.949.222
30	laboratory safety equipment lainnya (dst)	1	16.504.400
31	Rangka Penjepit	8	13.937.320
32	DC Power Supply	4	45.980.000
33	Function Generator (Modular Counting And Scientific Electronic)	4	42.020.000
34	Logic Pulser	8	9.680.000
35	system/power supply lainnya (dst)	2	11.000.000
36	Water Quality Analyzer System	1	75.494.100
37	alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst)	2	83.950.942
38	Portable SO2 Analyzer	1	358.642.900
39	Gas Cylinder	4	20.905.984
40	Alat Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak	2	25.385.800

No.	Klasifikasi	Jumlah	Nilai Aset*
41	Vibration Level Meter	2	300.015.100
42	Digital Multi Tester	8	42.828.088
43	Working Table For Ship Model	7	35.420.000
44	Universal Milling Machine (Pemesinan: Mechanical Workshop)	1	400.400.000
45	Vertical Bandsaw	2	78.100.000
46	Turning Tool Grinding Machine	2	13.200.000
47	Welding Table	8	32.548.294
	<b>ALAT PERSENJATAAN</b>		-
	<b>KOMPUTER</b>	<b>270</b>	<b>2.305.469.393</b>
1	Internet	1	3.000.000
2	Komputer Jaringan lainnya	2	37.488.000
3	P.C Unit	111	1.284.365.124
4	Lap Top	28	328.789.930
5	Note Book	32	340.691.816
6	Personal Komputer lainnya	1	28.050.000
7	Hard Disk	1	1.650.000
8	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	2.562.500
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	58	171.289.773
10	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	29.790.000
11	External/ Portable Hardisk	4	9.000.000
12	Peralatan Personal Komputer lainnya	17	46.292.250
13	Router	7	16.050.000
14	Peralatan Jaringan lainnya	2	6.450.000
	<b>ALAT EKSPLORASI</b>		-
	<b>ALAT PENGEBORAN</b>		-
	<b>ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>		-
	<b>ALAT BANTU EKSPLORASI</b>		-
	<b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>		-

No.	Klasifikasi	Jumlah	Nilai Aset*
	<b>ALAT PERAGA</b>		540.648.206
1	Alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya lainnya (dst)	17	540.648.206
	<b>PERALATAN PROSES/PRODUKSI</b>		-
	<b>RAMBU – RAMBU</b>		-
	<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>		-
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		<b>44.867.048.925</b>
	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>44.867.048.925</b>
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen Jalan Pulau Pongok Air Itam Pangkalpinang Prov Kep Babel	77,00	113.700.000
2	Bangunan Gedung Kantor PermanenJl. Pulau Pongok Air Itam Pangkalpinang. Komplek perkantoran Air Itam	128,00	2.047.709.000
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lainJl. Pulau Pongok Air Itam Pangkalpinang. Komplek perkantoran Air Itam	45,00	162.512.000
4	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain Jl. Pulau Pongok, Komp. Perkantoran Gubernur, Pangkalpinang	544,00	2.087.358.000
5	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain Jl. Pulau Pongok, Komp. Perkantoran Gubernur, Pangkalpinang	1.241,00	24.418.676.000
6	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya GEDUNG BLKI KOMPLEK PERKANTORAN GUBERNUR BANGKA BELITUNG	1.227,00	348.064.000
7	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya Jl. Pulau Pongok Air Itam Pangkalpinang. Komplek perkantoran Air Itam	112,00	174.755.000
8	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya Jl. Pulau Pongok, Komp. Perkantoran Gubernur, Pangkalpinang	1.220,00	1.539.389.159
9	Flat/Rumah Susun Permanen Jalan Raya Sungai Selan KM.5 Desa Mangkol, Kec.Pangkalan Baru, Kab.Bangka Tengah, Prov Kep Babel.		285.411.000
10	Flat/rumah Lain-lain (dst) Jalan Raya Sungai Selan KM.5 Desa Mangkol, Kec.Pangkalan Baru, Kab.Bangka Tengah, Prov Kep Babel.	951,69	13.591.974.766
	<b>MONUMEN</b>		<b>97.500.000</b>
1	tugu lainnya (dst) GEDUNG BLKI KOMPLEK PERKANTORAN GUBERNUR BANGKA BELITUNG	48,00	97.500.000

No.	Klasifikasi	Jumlah	Nilai Aset*
	<b>BANGUNAN MENARA</b>		-
	<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>		-
<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>		<b>3.548.025.750</b>
	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>		<b>2.344.568.000</b>
1	Jalan Kabupaten Lain-lain Jalan Transmigrasi KTM Batu Bepumpang Bangka Selatan		2.344.568.000
	<b>BANGUNAN AIR</b>		<b>20.000.000</b>
1	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain		20.000.000
	<b>INSTALASI</b>		<b>144.975.000</b>
1	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Jl. Pulau Pongok Air Itam Pangkalpinang		144.975.000
	<b>JARINGAN</b>		<b>1.038.482.750</b>
1	Jaringan Distribusi Lain-lain Jl. Pulau Pongok Air Itam Pangkalpinang		980.033.750
2	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain Jl. Pulau Pongok Air Itam Pangkalpinang		58.449.000
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		-
	<b>BAHAN PERPUSTAKAAN</b>		-
	<b>BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA</b>		-
	<b>HEWAN</b>		-
	<b>BIOTA PERAIRAN</b>		-
	<b>TANAMAN</b>		-
	<b>BARANG KOLEKSI NON BUDAYA</b>		-
	<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>		-
<b>6</b>	<b>KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		<b>694.840.000</b>
	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		<b>694.840.000</b>

No.	Klasifikasi	Jumlah	Nilai Aset*
<b>7</b>	<b>ASET LAINNYA</b>		<b>407.132.869</b>
	<b>ASET LAIN- LAIN / ASET RUSAK BERAT (USANG)</b>		<b>407.132.869</b>
1	A.C. Split	2	16.894.500
2	Alat Kantor Lainnya	1	3.025.000
3	Camera Video	1	3.681.750
4	Handy Cam	1	4.400.000
5	Komputer Jaringan lainnya	1	10.900.000
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	2.250.000
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.650.000
8	Kursi Putar	1	1.975.050
9	Lap Top	4	41.040.000
10	Layar Film/Projector	2	12.200.000
11	Lemari Besi/Metal	3	6.150.000
12	Meja Kerja Kayu	4	4.000.000
13	Mesin Fotocopy Lainnya	1	21.800.000
14	Mesin Gerinda Tangan	3	3.630.000
15	P.C Unit	6	38.100.000
16	Peralatan Las Listrik	2	88.448.800
17	Peralatan Personal Komputer lainnya	8	19.155.500
18	peralatan umum lainnya (dst)	1	41.800.000
19	perkakas bengkel service lainnya (dst)	4	55.159.600
20	Personal Komputer lainnya	1	10.692.000
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	14.177.969
22	Puller Set	1	1.650.000
23	Router	1	1.052.700
24	White Board	2	3.300.000
	<b>TOTAL ASET TETAP + ASET LAINNYA</b>		<b>42.054.364.216</b>

Kendaraan operasional Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 5 unit kendaraan Mini Bus, 11 unit kendaraan sepeda motor, 1 unit Mobil Ambulance, 1 unit Mobil Unit Kesehatan Masyarakat, 3 unit kendaraan bermotor khusus lainnya, 3 unit kapal motor, 2 unit alat angkut apung bermotor untuk penumpang lainnya. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 2. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 70. % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung tuntutan pekerjaan yang 80 % berbasis IT.

**Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023**

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2022	19.968.196.438,00	89.534.849,00	0,00	0,00	20.057.731.287,00
2023	20.047.427.704,00	76.718.100,00	0,00	0,00	21.136.879.237,00

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 dibanding tahun 2022 terdapat kenaikan total anggaran belanja sebesar Rp. 1.079.147.950,00 Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>1. a. Membuat peraturan Kepala Daerah tentang petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Lima tahunan dan Tahunan;</p> <p>b. Menyelaraskan Target Indikator sasaran antara Renstra dengan IKU, PK dan Renja dan memenuhi Kriteria SMART;</p> <p>C. Pegawai terlibat dalam merumuskan dan menempatkan Perencanaan Kinerja;</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian terget kinerja (output dan outcome) Tahun 2022 dengan langkah-langkah:</p> <p>1. a. Berkoordinasi dengan pihak terkait membuat Peraturan Kepala Daerah Tentang Petunjuk Teknis</p>

<p>d. Melakukan Pengukuran Kinerja secara berkala dengan data kinerja yang mendukung dan relevan;</p> <p>e. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penempatan / Penghapusan Jabatan baik Struktural maupun fungsional</p> <p>f. Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan ( Decision maker ) dalam mengukur capaian kinerja setiap Level Organisasi Kerja Unit Dibawahnya secara berjenjang;</p> <p>g. Melakukan Reviu laporan kinerja yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional ( Benchmark Kinerja ), agar informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian Utama pimpinan dan menjadi kepedulian seluruh pegawai dalam mencapai keberhasilan kinerja serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi;</p> <p>h. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan baik.</p> <p>i. Membuat surat keputusan kepada Kepala Dinas tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internasional;</p> <p>j. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai Standar oleh SDM yang memadai;</p> <p>k. Memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja;</p>	<p>Penyusunan Dokumen Perencanaan;</p> <p>b. Menyusun Target Indikator sasaran Renstra dan IKU, PK dan Renja yang memenuhi kriteria SMART;</p> <p>c. Akan melibatkan pegawai dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan Kinerja;</p> <p>d. Mengolah data Kinerja untuk pengukuran Kinerja Pertriwulan;</p> <p>e. Mengkoordinasikannya dengan pihak terkait</p> <p>f. Melibatkan Pimpinan sebagai pengambil Keputusan ( Decicion Maker );</p> <p>g. Melakukan Reviu laporan Kinerja secara Berkala untuk perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di Level Nasional/Internasional;</p> <p>h. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Internal secara berkala;</p> <p>i. Membuat SK Kepala Dinas tentang pedoman Teknis Akuntabilitas Kinerja Internal;</p> <p>j. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan SDM yang memadai;</p> <p>k. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal digunakan sebagai peningkatan Akuntabilitas Kinerja;</p>
--	--

# BAB 2

## Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RKPD tahun 2023

### 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah *Meningkatnya Tenaga kerja yang ditempatkan, Meningkatnya pengetahuan perusahaan terhadap sarana Hubungan Industrial, Meningkatnya perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan, Meningkatnya produktivitas kawasan*. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah *Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah*.

Adapun sasaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

**Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023-2026**

(tabel ini dapat di buat landscape)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi awal 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1.	Meningkatnya Pencari kerja yang dilatih dan/atau ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang dilatih dan/atau ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6,72%	5%	5,25%	5,5 %	5,75%	5,375%	
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi awal	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket

				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
2.	Meningkatnya perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25%	26%	27%	28%	29%	27,5%	
3.	Meningkatnya satuan Pemukiman yang telah mendapat Binaan	Presentase Satuan Pemukiman yang di Bina	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15%	30%	30%	31%	31%	30,5%	
4.	Meningkatkan Nilai RB	Nilai RB	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	45	46	47	48	49	47,5%	

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	1. Meningkatkan Pencari Kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan 2. Meningkatkan perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan	1. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja di bidang pertanian 2. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan 3. Meningkatkan produktifitas tenaga	1. meningkatnya kemitraan dengan perusahaan dibidang pertanian 2. meningkatnya kemitraan dengan perusahaan dibidang kelautan dan perikanan 3. meningkatnya kemitraan dengan perusahaan dibidang pariwisata

ketenagakerjaan	3. Meningkatkan Satuan Pemukiman Yang Telah Mendapat Binaan	kerja di bidang pariwisata 4. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja di bidang pertambangan 5. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja di bidang lainnya	4. meningkatnya kemitraan dengan perusahaan dibidang pertambangan 5. Meningkatnya penempatan tenaga kerja
-----------------	---	---	--

### 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

KODE REKENING		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp21.040.745.806	Rp23.506.724.158	Rp2.465.978.352
	02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	20.944.745.806	23.410.724.158	Rp2.465.978.352
A	02.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.528.712.406	20.207.445.837	Rp678.733.431
I	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233.200.000	233.200.000	

	2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	164.000.000	164.000.000	
	2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.200.000	69.200.000	
<b>II</b>	<b>2.07.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.975.712.406</b>	<b>14.644.705.967</b>	<b>-Rp331.006.439</b>
	2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.975.712.406	14.644.705.967	-Rp331.006.439
<b>III</b>	<b>2.07.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>157.187.880</b>	<b>157.187.880</b>	<b>0</b>
	2.07.01.1.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	157.187.880	157.187.880	0
<b>IV</b>	<b>2.07.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>391.990.994</b>	<b>903.364.874</b>	<b>Rp511.373.880</b>
	2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	75.000.000	
	2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.000.000	345.000.000	Rp200.000.000
	2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	50.000.000	Rp10.000.000
	2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.990.994	69.990.994	Rp30.000.000
	2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	
	2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	45.000.000	Rp15.000.000
	2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.000.000	308.373.880	Rp256.373.880
<b>V</b>	<b>2.07.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>549.166.000</b>	<b>Rp549.166.000</b>
	2.07.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	482.286.000	Rp482.286.000
	2.07.01.1.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	66.880.000	Rp66.880.000
<b>V</b>	<b>2.07.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.218.876.326</b>	<b>3.168.076.321</b>	<b>-Rp50.800.005</b>

	2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	
	2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	726.419.026	826.419.021	Rp99.999.995
	2.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.657.300	74.657.300	
	2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.412.800.000	2.262.000.000	-Rp150.800.000
<b>VI</b>	<b>2.07.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>551.744.800</b>	<b>551.744.795</b>	<b>-Rp5</b>
	2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.500.000	5.500.000	
	2.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.244.800	326.244.795	Rp99.999.995
	2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000	120.000.000	
	2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	
	2.07.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	0	-Rp100.000.000
<b>B</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>118.000.000</b>	<b>118.000.000</b>	
<b>I</b>	<b>2.07.02.1.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>118.000.000</b>	<b>118.000.000</b>	
	2.07.02.1.01.01	Penyusun Rencana Tenaga Kerja Makro	118.000.000	118.000.000	
<b>C</b>	<b>02.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>892.033.400</b>	<b>2.345.278.321</b>	<b>Rp1.453.244.921</b>

I	2.07.03.1.01	<b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	820.600.000	2.273.844.921	Rp1.453.244.921
	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	284.016.948	1.362.261.914	Rp1.078.244.966
	2.07.03.1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	100.294.000	100.294.000	
	2.07.03.1.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	436.289.052	811.289.007	Rp374.999.955
II	2.07.03.1.04	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>	71.433.400	71.433.400	
	2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	71.433.400	71.433.400	
D	02.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	30.000.000	214.000.000	Rp184.000.000
	2.07.04.1.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	0	184.000.000	Rp184.000.000
	2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	0	184.000.000	Rp184.000.000
I	2.07.04.1.05	<b>Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	30.000.000	30.000.000	
	2.07.04.1.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000	30.000.000	
E	02.07.05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	186.000.000	196.000.000	Rp10.000.000

I	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000	
	2.07.05.1.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	18.000.000	18.000.000	
	2.07.05.1.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	18.000.000	18.000.000	
	2.07.05.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	34.000.000	34.000.000	
II	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	70.000.000	80.000.000	Rp10.000.000
	2.07.05.1.02.01	Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi	28.000.000	28.000.000	
	2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	24.000.000	34.000.000	Rp10.000.000
	2.07.05.1.02.05	Pembinaan pengupahan skala provinsi	18.000.000	18.000.000	

III	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	46.000.000	46.000.000	
	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	32.000.000	32.000.000	
	2.07.05.1.03.05	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	14.000.000	14.000.000	
<b>F</b>	<b>02.07.06</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>190.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	<b>Rp140.000.000</b>
<b>I</b>	<b>2.07.06.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>190.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	<b>Rp140.000.000</b>
	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	101.000.000	241.000.000	Rp140.000.000
	2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	70.000.000	70.000.000	
	2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	19.000.000	19.000.000	
<b>G</b>	<b>03.32.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>96.000.000</b>	<b>96.000.000</b>	
	<b>3.32.04.1.01</b>	<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan</b>	<b>96.000.000</b>	<b>96.000.000</b>	
	3.32.04.1.01.02	Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pematapan satuan permukiman	96.000.000	96.000.000	

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan				Target
					I	II	III	IV	
1.	Meningkatnya Pencari kerja yang dilatih dan / atau ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang dilatih dan/atau ditempatkan	%	5%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	5%
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan				Target
					I	II	III	IV	
2.	Meningkatnya perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	%	26%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	26%
3.	Meningkatnya satuan Pemukiman yang telah mendapat Binaan	Presentase Satuan Permukiman yang di Bina	%	14%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	14%
4.	Meningkatnya Nilai RB	Nilai RB	-	46	11,5	11,5	11,5	11,5	46

Pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan				Target
					I	II	III	IV	
1	Meningkatnya Pencari kerja yang dilatih dan / atau ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang dilatih dan/atau ditempatkan	%	5%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	5%
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan				Target
					I	II	III	IV	
2.	Meningkatnya perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	%	26%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	26%
3.	Meningkatnya satuan Pemukiman yang telah mendapat Binaan	Presentase Satuan Permukiman yang di Bina	%	14%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	14%
4.	Meningkatnya Nilai RB	Nilai RB	-	46	11,5	11,5	11,5	11,5	46

**Keterangan Tambahan:**

1. Indikator Kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi anggaran bertambah 3,36% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk pembiayaan Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
3. Mengelola anggaran dekonsentrasi, yaitu:
  - 3.1. Program Pembinaan Ketenagakerjaan/ Ditjen Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Rp. 149.602.000
  - 3.2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi/ Ditjend Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas : Rp. 1.695.175.000
  - 3.3. Program Pembinaan Ketenagakerjaan/ Ditjend Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja : Rp. 416.100.000
  - 3.4. Program Pembinaan Ketenagakerjaan/Ditjend Pembinaan Hubungan Industrial

- dan Jaminan sosial Tenaga Kerja: Rp. 497.163.000
- 3.5. Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi/ Ditjend  
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Trasmigrasi : Rp. 496.916.000

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2022
2. Realisasi Anggaran
3. Inovasi
4. Lintas Sektor

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2023

(tabel ini dapat di buat landscape)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET
						TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA /KODE	AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Pencari Kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan	Indikator : Persentase Pencari Kerja yang dilatih/atau ditempatkan  Formula Perhitungan : $\frac{\Sigma \text{Pencari Kerja yang dilatih/ atau Ditempatkan}}{\Sigma \text{Pencari Kerja Yang Terdaftar}} \times 100\%$	%	6,72%	6,72%	5%	5%	100%	Hijau Tua	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET
						TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA /KODE	AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya Perusahaan yang memahami dan/ atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Indikator : Persentase peningkatan perusahaan yang memahami dan/atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan  Formula Perhitungan : $\frac{\Sigma \text{Perusahaan yang mendapat pembinaan dan/atau pengawasan}}{\Sigma \text{Perusahaan sesuai WLKP tahun sebelumnya}} \times 100\%$	%	-	25%	26%	25%	100%	Hijau Tua	100%
3.	Meningkatnya Satuan Pemukiman yang telah mendapatkan Binaan	Indikator : Presentase Satuan Pemukiman yang Dibina  Formula Perhitungan : $\frac{\Sigma \text{ SP yang dibina}}{\Sigma \text{ Seluruh SP}} \times 100\%$	%	-	15%	30%	15%	100%	Hijau Tua	100%
4.	Meningkatnya Nilai RB	Indikator : Nilai RB  Formula Perhitungan : Nilai RB	-	-	45	46	45	100	Hijau Tua	100

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**3.1.1. Sasaran : Meningkatnya Pencari Kerja yang dilatih dan / atau ditempatkan**

Kinerja sasaran “Meningkatnya Pencari Kerja yang dilatih dan / atau ditempatkan” diukur dengan indikator “Persentase Pencari kerja yang dan / atau ditempatkan”. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

$\frac{\Sigma \text{ Pencari Kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan}}{\Sigma \text{ Pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$
--

**a. Sasaran : Meningkatnya perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan**

Kinerja sasaran “Meningkatnya perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan ” diukur dengan indikator “Persentase Peningkatan perusahaan yang memahami dan / atau mematuhi peraturan Ketenagakerjaan”.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Perusahaan yang mendapat pembinaan dan / atau Pengawasan}}{\Sigma \text{Perusahaan sesuai WLKP Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

**b. Sasaran : Meningkatnya Satuan Pemukiman yang telah mendapatkan Binaan**

Kinerja sasaran “Meningkatnya Satuan Pemukiman yang telah mendapatkan Binaan “ diukur dengan indikator “Persentase Satuan Pemukiman yang diBina”. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ SP yang diBina}}{\Sigma \text{ Seluruh SP}} \times 100\%$$

**c. Sasaran : Meningkatnya Nilai RB**

Kinerja sasaran “Meningkatnya Nilai RB“ diukur dengan indikator “Nilai RB”. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

**Nilai RB**

**Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pencari kerja yang dilatih dan / atau ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang dilatih dan/atau ditempatkan	$\frac{\Sigma \text{ Pencari Kerja yang dilatih/ atau Ditempatkan}}{\Sigma \text{ Pencari Kerja Yang Terdaftar}} \times 100\%$
2	Meningkatnya perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	$\frac{\Sigma \text{ Perusahaan yang mendapat pembinaan dan/atau pengawasan}}{\Sigma \text{ Perusahaan sesuai WLKP tahun sebelumnya}} \times 100\%$

3	Meningkatnya satuan Permukiman yang telah mendapat Binaan	Presentase Satuan Permukiman yang di Bina	$\frac{\Sigma \text{ SP yang dibina}}{\Sigma \text{ Seluruh SP}} \times 100\%$
4	Meningkatnya Nilai RB	Nilai RB	Nilai RB

Kinerja sasaran “Meningkatnya Tenaga Kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan” diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan “Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih dan/ atau dibagi Jumlah Pencari kerja yang terdaftar dikali seratus persen”. Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 6,72% dari target 5 %. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja sasaran “Meningkatnya perusahaan yang memahami dan/ atau mematuhi Peraturan Ketenagakerjaan” diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan “Jumlah Perusahaan yang mendapat pembinaan dan /atau Pengawasan dibagi Jumlah Perusahaan Sesuai WLKP tahun sebelumnya dikali seratus persen”. Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 25% dari target 26 % . Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja sasaran “Meningkatnya Satuan Permukiman yang Telah mendapat Binaan” diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan “Jumlah SP yang diBina dibagi Jumlah Seluruh SP dikali seratus persen”. Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 15% dari target 30%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja sasaran “Meningkatnya Nilai RB” diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan “Nilai RB”. Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 45% dari target 46%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra 2023	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pencari kerja yang dilatih dan / atau ditempatkan	6,72%	5%	5%	100%	5%	5%
2	Meningkatnya perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	25%	26%	26%	100%	26%	26%
3	Meningkatnya satuan Pemukiman yang telah mendapat Binaan	15%	30%	30%	100%	30%	30%
4	Meningkatnya Nilai RB	45	46	46	100%	46	46

Analisis Ketercapaian Sasaran ***Meningkatnya pencari kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan*** adalah sebagai berikut:

- Tercapai 100% , dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 5% .
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 6,7% , terhadap target tahun lalu sebesar 5,59% (data Lkj Tahun lalu) terdapat peningkatan sebesar 1,11%.
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- Program Penempatan Tenaga Kerja dengan sasaran program Meningkatnya Pencari kerja yang dilatih dan / atau ditempatkan mempunyai Indikator Persentase Pencari Kerja Yang dilatih dan / atau Ditempatkan formula perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Tenaga kerja yang dilatih dan / atau ditempatkan}}{\Sigma \text{ Pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$$

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(1.274/2.461) \times 100\% = 51,76\%$  dari target 5%.

Capaian ini didukung oleh :

- a. Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
- c. Kegiatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kemudian dihitung rerata validitas setiap parameter tersebut dalam persen.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran program sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pencari kerja yang berkompentensi
- b. Meningkatnya kerjasama pemerintah dengan sektor swasta
- c. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas

Mempunyai Indikator sebagai berikut :

- a. Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Keterampilan berdasarkan klaster kompetensi
- b. Persentase pencari kerja mendapatkan informasi Layanan BLK
- c. Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas

Formula perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Produktivitas Jumlah Perusahaan yang di Tingkatkan}}{\text{Target}}$$

Capaian indikator kinerja adalah 15 Perusahaan dari target sebesar 15 Perusahaan. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini Sama pada Tahun 2022 yang sebesar 15 Perusahaan (capaian tahun lalu). Target diproyeksikan akan tercapai melalui pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023.

Analisis Ketercapaian Sasaran *Meningkatnya perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan* adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 31,72% , dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 26% ( terlampaui).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 45,99% , terhadap target tahun lalu sebesar 48% (data Lkj Tahun lalu) terdapat peningkatan sebesar 2,01% .

- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program sebagai berikut :

1. Program Hubungan Industrial dengan sasaran program Meningkatnya hubungan industrial di perusahaan mempunyai Indikator Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial formula perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Perusahaan yang mendapat pembinaan dan / atau Pengawasan}}{\Sigma \text{Perusahaan sesuai WLKP Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(2.547/8.029) \times 100\% = 31.72\%$  dari target 26%. Capaian ini didukung oleh :

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Kemudian dihitung merata valliditas setiap parameter tersebut dalam persen.

Analisis Ketercapaian Sasaran ***Meningkatnya perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan*** adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 31.72% , dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 3,27 % (terlampai).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 7.04%, terhadap target tahun lalu sebesar 3.27% (data Lkj Tahun lalu) terdapat kenaikan sebesar 3,77%.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program sebagai berikut :

1. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sasaran program Meningkatnya perusahaan yang memahami norma K3 mempunyai Indikator Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan ketenagakerjaan formula perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Perusahaan}}{\Sigma \text{ Perusahaan yang memahami Norma K3}} \times 100\%$$

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(40/400) \times 100\% = 10\%$  dari target 26%. Capaian ini didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan kemudian dihitung merata valliditas setiap parameter tersebut dalam persen.

- d. Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Satuan Pemukiman yang telah mendapatkan Binaan adalah sebagai berikut:
- Tercapai 14%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 14 %.
  - Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 100% , terhadap target tahun lalu sebesar 15% (data Lkj Tahun lalu) tidak terdapat peningkatan 85% .
  - Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program sebagai berikut :

- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan sasaran program Meningkatnya kawasan transmigrasi mempunyai Indikator Berkembangnya Satuan Kawasan Transmigrasi formula perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 15% dari target 15%. Capaian ini didukung oleh Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan kemudian dihitung merata valliditas setiap parameter tersebut dalam jumlah.

Analisis Ketercapaian Sasaran **Meningkatnya Nilai RB** adalah sebagai berikut:

- Tercapai 30,34, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 45 belum melampaui.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 14,81 (belum menjadi sasaran strategis), terhadap target tahun lalu sebesar 45, untuk tahun lalu (2021) sasaran tersebut belum masuk daftar target sasaran strategis.
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tidak tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan sasaran program Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai Indikator Nilai Sakip PD formula perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

Nilai RB

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 30,34 Capaian ini didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



kemudian dihitung merata valliditas setiap parameter tersebut dalam jumlah.

**Tabel III.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pencari kerja yang dilatih dan/ atau ditempatkan	5%	51,76%	100%
	Jumlah Kerja Pencari Yang dilatih dan/ atau Ditempatkan dibagi Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar di kali seratus			
	$(1.274/2.461) \times 100\% = 51,76\%$			
2	Persentase Peningkatan perusahaan yang memahami dan / atau mematuhi peraturan Ketenagakerjaan	26%	31,72%	100%
	Jumlah Perusahaan yang mendapat pembinaan dan /atau pengawas dibagi Jumlah Perusahaan sesuai WLKP tahun sebelumnya dibina dikali seratus			
	$(2.547/8.029) \times 100 = 31,72\%$			

3	Persentase Presentase Satuan Permukiman yang di Bina	14%	44,18%	100%
	Jumlah SP yang di bina dibagi Jumlah Seluruh SP dikali seratus			
	$(1.256/2.843) \times 100\% = 44,18\%$			
4.	Nilai RB	46		
	Nilai RB			
	-			

### DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

No	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Pelaksanaan Pemeriksaan Kasus Kecelakaan Kerja di Perusahaan
2.		Pelaksanaan Pengujian Peralatan K3 di Tempat Kerja

3.



Pelaksanaan Pembinaan  
Norma Ketenagakerjaan di  
Perusahaan

4.



Pelaksanaan Pemeriksaan  
Norma Ketenagakerjaan di  
Perusahaan

5.



Pelaksanaan Gelar Perkara  
Kasus Ketenagakerjaan

6.



Pelaksanaan Pemeriksaan  
Pengaduan Ketenagakerjaan

7.		Pengaduan Ketenagakerjaan
No	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
8		Rapat Penetapan UMP tahun 2023
9.		Bimbingan Teknis Petugas Antar Kerja

10.		Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
No	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	
11.		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi
12.		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi

--	--	--

### Faktor Pendukung keberhasilan

- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN.
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.
- Adanya tim yang solid.

### Faktor Penghambat keberhasilan

- Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium jabatan fungsional baru.
- Kebijakan kepegawaian menunggu keputusan pimpinan dan pusat.
- Sarana dan Prasarana yang belum memadai dalam penunjang program kegiatan;
- Kurangnya Inovasi dalam pembuatan Program Pelatihan.
- Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi.

## 3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pencari kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan	Persentase Pencari kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan	5%	51,76 %	100%	Rp.2.677.278.231	Rp.1.991.040.537	81,65%	Rp.686.237.694
2	Meningkatnya Perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi	Persentase peningkatan perusahaan yang memahami dan /atau	26%	31.72%	100%	Rp.526.000.000	Rp.317.306.704	63,72%	Rp.208.693.296

	peraturan ketenagakerjaan	mematuhi peraturan ketenagakerjaan							
3	Meningkatnya perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan perusahaan yang menjalankan ketenagakerjaan	14%	44,18%	100%	Rp.96.000.000	Rp.94.022.400	97,94%	Rp.1.977.600
4	Meningkatnya Nilai RB	Nilai RB	45			Rp. 20.207.445.837	Rp. 19.308.848.304	95,55%	Rp. 898.597.533
<b>Total Belanja</b>						Rp.23.506.724.158	Rp.21.804.017.946	92,76%	Rp.1.702.706.212

Sumber: *http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2023, Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023*

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2023 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 23.506.724.158 terealisasi Rp.21.804.017.946 atau 92,76% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 1.702.706.212 atau 7,24% yang bersumber dari:

- Sisa Penyediaan dan Perlengkapan kantor
- Efisiensi belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas
- Efisiensi Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit
- Efisiensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

### 3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu *WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja antara lain pada link :*

- a. <https://www.instagram.com/disnaker.babel/>
- b. [https://twitter.com/disnaker\\_babel](https://twitter.com/disnaker_babel)
- c. <https://www.linkedin.com/in/disnaker-pemprov-babel-73425317b/>
- d. <https://www.facebook.com/disnaker.pemprov.kep.babel>
- e. <https://www.facebook.com/disnaker.p.babel>
- f. <https://www.facebook.com/disnakerbabel>
- g. <https://www.lapor.go.id/admin/laporan/kelola>
- h. <https://disnaker.babelprov.go.id/>

### 3.4 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

- Penghargaan Indek Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2022 dari Kementrian Ketenagakerjaan RI untuk kategori urusan ketenagakerjaan kecil terbaik kedua.



Dipindai dengan CamScanner

# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Data dukung yang kurang memadai;
2. Kurangnya koordinasi yang baik antar pemerintahan kabupaten/ kota dengan pemerintah provinsi.

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan sasaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. Koordinasi internal Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala dan dikemas dalam acara *Coffee Morning*;
3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten/ Kota, terkait tindak lanjut dari setiap kegiatan dalam menganbil data-data terkait dinas tenaga kerja;
2. Melakukan koordinasi dalam rangka mengumpulkan data dukung;
3. Menyiapkan data dalam mendukung setiap kegiatan yang mengenai ketenagakerjan.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Indeks Pembangunan Tenaga Kerja	Meningkatnya Pencari kerja yang dilatih dan / atau ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang dilatih dan/atau ditempatkan	5%	5,25%	5,5 %	5,75%
		Meningkatnya perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	26%	27%	28%	29%
		Meningkatnya satuan Permukiman yang telah mendapat Binaan	Presentase Satuan Permukiman yang di Bina	30%	30%	31%	31%
		Meningkatnya Nilai RB	Nilai RB	46	47	48	49

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

“Scan dokumen PK Kepala Perangkat Daerah”



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELIUS GANI, SP  
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Drs. SAFRIZAL ZAKARIA ALI, M,SI  
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Oktober 2023

<p>PIHAK KEDUA, Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,</p>  <p>Dr. Drs. SAFRIZAL ZAKARIA ALI, M,SI</p>	<p>PIHAK PERTAMA, KEPALA DINAS TENAGA KERJA</p>  <p>ELIUS GANI, SP Pembina Utama Madya NIP.19710115 199503 1 001</p>
--	--

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

<b>NO.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Formula Penghitungan Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pencari Kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan	Presentase Pencari Kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan	5%	$\frac{\Sigma \text{Pencari Kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan}}{\Sigma \text{Pencari kerja yang terdaftar di AK1}} \times 100 \%$
2.	Meningkatnya perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase peningkatan perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	26 %	$\frac{\Sigma \text{Perusahaan yang mendapat pembinaan dan /atau pengawasan}}{\Sigma \text{Perusahaan sesuai WLKP Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya Satuan Pemukiman Yang Telah Mendapat Binaan	Persentase Satuan Pemukiman Yang Dibina	14%	$\frac{\Sigma \text{ SP yang dibina}}{\Sigma \text{ Seluruh SP}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya Nilai RB	Nilai RB	46	Nilai RB

Anggaran :

NO.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Nilai RB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 20.207.445.837	
2.	Presentase Pencari Kerja yang dilatih dan /atau ditempatkan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 2.345.278.231	
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 118.000.000	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 214.000.000	
3.	Persentase peningkatan perusahaan yang memahami dan /atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial	Rp 196.000.000	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp. 330.000.000	
4.	Persentase Satuan Pemukiman Yang Dibina	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 96.000.000	

Pangkalpinang, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

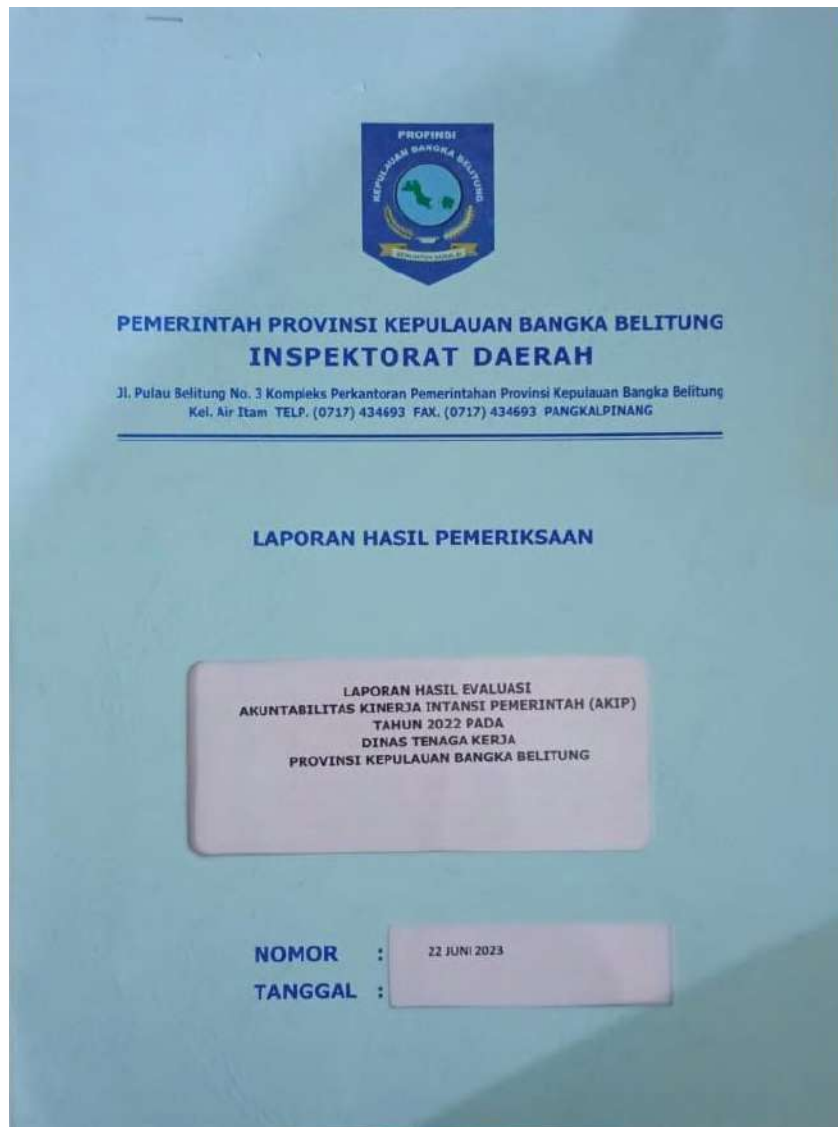
Dr. Drs. SAFFIZAL ZAKARIA ALI, M,SI

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA

ELIUS GANI, SP  
Pembina Utama Madya  
NIP.19710115 199503 1 001

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2022

Scan Dokumen LHE Akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja





**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TEL/FAX. (0717) 434693, 439313 – PANGKALPINANG

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
TAHUN 2022 PADA  
DINAS TENAGA KERJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 700/147/LHE/ITDA/2023  
TANGGAL : 22 JUNI 2023



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
**KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
JL. PULAU BELITUNG KEL. AIR ITAM TELP. (0717) 439313 FAX 434693

Pangkalpinang, 22 Juni 2023

Nomor : 700/M7 /LHE/ITDA/2023  
Kategori : Rahasia  
Sifat : -  
Materi : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung  
di -  
Pangkalpinang

Berdasarkan surat tugas Inspektur a.n. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/3/EVA-ITDA/2023 tanggal 31 Maret 2023 hal melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauhmana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- Memperoleh Informasi mengenai implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemamfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan nilai sebesar 62,31 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja 'baik, yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanyasedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II unit kerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,90
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,20
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,50
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		100	62,31
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			B

Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja pada level perangkat daerah.

- f. Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
- g. Setiap level organisasi kerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- h. Melakukan revaluasi laporan kinerja yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- i. Agar Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan dan menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- j. Agar informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi
- k. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan baik.
- l. Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- m. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai standar oleh SDM yang memadai.
- n. Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

  
 INSPEKTUR  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, B/L  
 SVSANTO  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 1963061211985031001

busan:  
 enteri PAN dan RB;  
 ubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2022

Scan Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2022

RENCANA AKSI ( ACTION PLAN)  
TINDAK LANJUT REKOMENDASI  
LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TA 2022

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
a.	Membuat peraturan kepala daerah tentang petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan;	Berkoordinasi dengan pihak terkait membuat peraturan Kepala Daerah tentang petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan	setelah hasil evaluasi disampaikan	Disnaker
b.	Menyelaraskan target indikator sasaran antara Renstra dengan IKU, PK dan Renja dan memenuhi kriteria SMART;	Menyusun target indikator sasaran Renstra dan IKU, PK dan Renja yang memenuhi kriteria SMART	setelah hasil evaluasi disampaikan, sampai ditetapkan APBD 2024	
c.	Pegawai terlibat dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja;	Akan melibatkan pegawai dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja	setelah hasil evaluasi diterima sampai penetapan perencanaan tahun 2024	
d.	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan data kinerja yang mendukung dan relevan;	Mengolah data kinerja untuk pengukuran kinerja per triwulan	triwulan 3 & 4	
e.	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penempatan / penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional	Mengkoordinasikannya dengan pihak terkait	Agustus - September	
f.	Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja Setiap level organisasi kerja unit dibawahnya secara berjenjang;	Melibatkan pimpinan sebagai pengambil keputusan (Decicion Maker)	Agustus - September	

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
g.	Melakukan reuiu laporan kinerja yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional ( Benchmark Kinerja ), Agar informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan dan menjadi kepedulian seluruh pegawai dalam pencapaian keberhasilan kinerja serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi;	g. Melakukan reuiu laporan kinerja secara berkala untuk perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	Sampai bulan Desember	
h.	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan baik.	h. Melakukan evaluasi akuntabilitas internal secara berkala	Bulan September - Desember	
i.	Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internasional:	i. Membuat SK Kepala Dinas tentang pedoman teknis akuntabilitas kinerja internal	Hasil evaluasi diterima sampai bulan Oktober	
j.	Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai standar oleh SDM yang memadai;	j. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan SDM yang memadai	Hasil evaluasi diterima sampai bulan Desember	
k.	Memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabiilitas kinerja	k. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal digunakan sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja	Hasil evaluasi diterima sampai bulan Desember	

Lampiran 5. SK IKU Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Scan IKU PD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KEPUL  
BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/007/ DISNAKER  
TANGGAL : 12 JANUARI 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TENAGA KERJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2023 - 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)
			Tahun 2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya Pencari Kerja yang dilatih dan/atau ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang dilatih dan/atau ditempatkan	6,72%	5%	5,25%	5,5%	5,75%	Peningkatan Pencari Kerja yang dilatih dan/atau ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih dan/atau ditempatkan : Jumlah Pencari kerja yang terdaftar di AKI X 100%	
2	Meningkatnya perusahaan yang memahani dan/atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase peningkatan perusahaan yang memahani dan/atau mematuhi peraturan ketenagakerjaan	25%	26%	27%	28%	29%	Peningkatan pemahaman perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang mendapat pembinaan dan/atau pengawasan : Jumlah Perusahaan sesuai WLKP Tahun Sebelumnya X 100%	
3	Meningkatnya Satuan Pemukiman Yang Telah Mendapat Binaan	Persentase Satuan Pemukiman Yang Dibina	15%	30%	30%	31%	31%	Peningkatan Satuan Pemukiman Yang Telah Mendapat Binaan	Jumlah SP yang dibina : Jumlah Seluruh SP X 100	
4	Meningkatnya Nilai RB	Nilai RB	45	46	47	48	49	Peningkatan Nilai RB	Nilai RB	

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUNARDI